# BAB I

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Samudra Arktik yang memiliki luas 14.056.00 $Km^{2}$ dikelilingi oleh beberapa negara di wilayah utara, diantaranya Rusia, Alaska (Amerika Serikat), Kanada, Norwegia, dan Greenland (Denmark). Pembagian wilayah Arktik didasari oleh hukum nasional dari masing-masing negara yang berada di lingkar Arktik dan di dukung oleh kesepakatan Internasional yaitu *The Svalbard Treaty* dalam *Status of Spitsbergen* yang ditandatangani di Paris pada 1920 (Putra & Ii, 2017). Dalam perjanjian ini ada ketentuan penetapan zona netral diantara negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Arktik bahwa setiap negara mendapatkan hak yang sama untuk mengeksploitasi deposit mineral dan sumber daya alam yang tersedia di wilayah tersebut. Setelah kesepakatan tersebut terjadi pembaharuan dalam penetapan batas wilayah perairan yang diatur dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* I (UNCLOS I) pada tahun 1958 (Harrison, 2008)

Konferensi UNCLOS III yang diadakan pada tahun 1982 membahas suatu regulasi dalam penetapan batas laut dari konvensi sebelumnya. Hasil dari ratifikasi konferensi tersebut ialah memberi hak eksklusif bagi negara dengan garis pantai untuk mengelola sumber daya negaranya pada zona 200 mil yang diperpanjang dari batas perairan sebelumnya 12 mil (Putra & Ii, 2017). Pemberian hak bagi negara untuk mengajukan klaim terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diluar batas 200 mil dapat disetujui apabila negara tersebut menyerahkan bukti untuk mendukung klaim tersebut, dan diserahkan kepada *United Nations Commision on the Limits of the Continental Shelf* (Johnston, 2010). Rusia telah melakukan pengajuan kepada CLCS untuk mengubah batas ZEE yang sebelumnya 200 mil laut menjadi 350 mil laut yang membuat Rusia merupakan satu-satunya negara yang memiliki wilayah terluas di Kawasan Arktik. Namun, pengajuan tersebut sudah ditolak oleh UNCLOS pada tahun 2001, akan tetapi Rusia masih terus bersikeras untuk memberikan bukti yang dapat mengubah batas ZEE yang dimiliki oleh Rusia.

Kehadiran kebijakan *Russia’s New Arctic Strategy* didukung dengan adanya perubahan iklim global. Diperkirakan bahwa lautan es di Samudra Arktik Sebagian besar akan hilang dan menimbulkan berbagai dampak perubahan fisik, ekologi, ekonomi, sosial, dan geopolitik di Samudra Arktik. Karena perubahan iklim yang terjadi, menimbulkan suatu pertarungan geopolitik yang baru. Samudra Arktik memiliki 10% dari total produksi global untuk konsumsi manusia (Tjarsono & Si, 2020). Akibat dari perubahan iklim yang terjadi saat ini, dengan menjadikan wilayah Samudra Arktik sebagai aspek perdagangan serta produksi sumber daya alam, tentu negara-negara di kawasan Arktik memiliki kepentinga nasional-nya masing-masing untuk memiliki keuntungan dari mencairnya es di Arktik. Rusia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di wilayah Arktik. Oleh karena itu Rusia memiliki potensi yang sangat besar di wilayah Arktik. Sebuah organisasi internasional yaitu *US Geological Survey* (USGS) pada tahun 2008 telah melakukan sebuah penelitian bahwa terdapat potensi minyak, gas alam, dan gas cair di wilayah Arktik. Diperkirakan Arktik memiliki sekitar 30 persen sumber daya gas alam yang tersisa di dunia, atau sekitar 44 miliar barel, dan 13 persen dari pasokan minyak yang belum dimanfaatkan, atau sekitar 90 miliar barel (Charpentier, R.R, 2009). Dengan banyaknya potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah Arktik, tentu negara-negara yang berada dalam lingkaran wilayah Arktik menjadikan wilayah tersebut sebagai peluang untuk mencapai kepentingan-nya masing-masing.

Tindakan Rusia di Kawasan Samudra Arktik terbagi atas dua bentuk, yaitu perluasan ZEE di perairan Arktik dan status terhadap *Nothern Sea Route* (NSR). Perluasan ZEE tersebut terdapat di wilayah *Lomonosov Ridge* dan Laut Barents. (Blank et al., 2011). Kedua wilayah tersebut memiliki potensi yang besar dalam bidang ekonomi melalui sumber daya mineral dan perikanan. Selain itu, NSR akan menjadi rute pelayaran baru, karena memiliki potensi yang dapat mempersingkat rute pelayaran antara Eropa dan Asia di wilayah Utara. Strategi tersebut merupakan kepentingan prioritas Rusia di kawasan Arktik melalui kebijakan *Russia’s New Arctic Strategy*, kebijakan tersebut merupakan dampak dari adanya perubahan iklim yang terjadi saat ini. Sikap Rusia yang asertif dengan tujuan menjadikan wilayah Arktik sebagai *Nothern Sea Route* (NSR) dan pengambilan sumber daya alam yang terdapat di Samudra Arktik mendapatkan respon dari negara-negara Arktik. Hal ini karena wilayah yang di klaim oleh Rusia mengganggu stabilitas politik terhadap negara-negara di wilayah Arktik. Diantaranya, Sengketa Teritorial antara Rusia dan Amerika Serikat di Laut Bering, Sengketa Laut Barents antara Rusia dan Norwegia, Sengketa terhadap *Lomonosov Ridge* antara Rusia, Kanada, dan Denmark (Connolly, 2017).

Sikap Rusia telah sampai kepada tahap agresi militer, pada tahun 2007 Rusia menjalankan sebuah misi dengan tujuan menyatakan klaim di wilayah *Lomonosov Ridge* dengan mengirim dua armada kapal selam. Kedua kapal tersebut bergerak sedalam 2,5 mil (4 km) ke dasar Samudra Arktik, Rusia menaruh sebuah wadah titanium yang berisi bendera Rusia untuk menjadi pendukung Argumen Rusia kepada UNCLOS bahwa *Lomonosov Ridge* merupakan wilayah kedaulatan Rusia (Blank et al., 2011). Negara-negara Barat menganggap bahwa sikap Asertifitas Rusia di Samudra Arktik dapat memicu konflik dan bersifat provokatif yang mengancam kedaulatan negara-negara di Kawasan Arktik. Tentu hal ini memberikan dampak kepada negara-negara di wilayah Arktik, dengan sikap asertifitas tersebut, negara-negara di Kawasan Arktik yang mayoritas bagian dari *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) saling berkoordinasi untuk memberikan respon terhadap asertifitas Rusia dengan menaruh kehadiran militer di beberapa perairan Arktik (Putra & Ii, 2017).

 Setelah berakhirnya Perang Dingin, NATO mengalihkan fokusnya ke operasi di luar wilayah. Akibatnya, Kutub Utara tidak lagi menjadi area fokus dalam perencanaan NATO, yang mengakibatkan memburuknya kemampuan untuk perang maritim (Mikkola, 2019). Dengan adanya sikap Rusia yang melakukan klaim sepihak hingga mengganggu kedaulatan negara-negara Arktik, pada akhirnya NATO melakukan pencegahan untuk melawan upaya militerisasi ekspansi Rusia di wilayah Arktik. Pertemuan anggota NATO pada tahun 2016 menghasilkan sebuah pernyataan bahwa *“In the North Atlantic, as elsewhere, the Alliance will be ready to deter and defend against any potential threats, including against sea lanes of communication and maritime approaches of NATO territory. We will further strengthen our maritime posture and comprehensive situational awareness”*. Dengan pernyataan tersebut, NATO melakukan patroli Angkatan laut di wilayah Arktik untuk mencegah sikap asertif Rusia, sementara negara-negara Arktik yang tergabung dengan NATO melakukan investasi di berbagai bidang seperti pertahanan rudal balistik untuk wilayah Arktik (Evers, 2021). Dalam konteks ini, NATO mulai merenungkan peran apa yang harus mereka mainkan terkait untuk perkembangan masa depan di wilayah Arktik. Aliansi memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mencegah konflik di wilayah dan untuk mengendalikan eskalasi ketika konflik tersebut tidak dapat terhalang. NATO juga dapat membantu mengurangi ketegangan dengan menyediakan forum di mana semua jurusan Negara-negara Arktik dapat lebih terbuka mendiskusikan keabsahan mereka kepentingan nasional di Arktik dan keprihatinan mereka atas cara terbaik untuk melindungi kepentingan tersebut dalam jangka panjang, kekhawatiran yang masih sulit untuk mengudara di Dewan Arktik. Mengingat bahwa Rusia kemungkinan akan memainkan peran kunci dalam memastikan Stabilitas jangka panjang kawasan Arktik di masa depan, sebuah tantangan besar untuk NATO akan merancang kebijakan yang tepat yang memenuhi kepentingan keamanan fundamental para anggotanya (Perry & Andersen, 2012).

Arktik menjadi area baru bagi NATO, area di mana keamanan terkait erat dengan kepentingan yang sangat penting dari negara-negara anggotanya. Pada tahun 2009, Sekretaris Jenderal NATO Jaap de Hoop Scheffer berpidato pada konferensi Aliansi di Reykjavik yang membahas prospek keamanan di Far North, mengatakan bahwa perubahan iklim dan pencairan es membuka akses yang lebih besar kepada energi dan kelautan sumber daya, lalu dikombinasikan dengan potensi rute navigasi trans-Arktik baru. Untuk pertama kalinya setelah akhir Perang Dingin, NATO mengidentifikasi Arktik sebagai wilayah strategis yang penting yang membutuhkan konstan perhatian dan pendekatan serta solusi baru. Kegiatan Aliansi di wilayah tersebut ditingkatkan dalam pola umum interpretasi globalis universal tentang keamanan yang dirumuskan secara konseptual dalam Strategi NATO 1999. Pendekatan strategis komprehensif yang baru terkait masalah keamanan telah menyebabkan ekspansi aktivitas NATO di luar wilayah Atlantik Utara (Shaparov, 2014). NATO masih kekurangan status aktor di bidang hubungan internasional di Kutub Utara. Karena NATO adalah aliansi antar-pemerintah dari negara-negara berdaulat dengan keputusan di dalamnya di masa damai yang disahkan konsensus semua anggotanya. Selain itu, sikap negara-negara anggota NATO mengenai Arktik jelas ditentukan oleh kepentingan ekonomi masing-masing yang menjadi prioritas kompetitif masing-masing. Misalnya, Instruksi Keamanan Nasional pada Januari 2009 yang menentukan Kebijakan AS di kawasan Arktik mengacu pada kebebasan laut sebagai prioritas nasional utama. Ini menyiratkan kebebasan pelayaran dan navigasi udara melalui Lintasan Barat Laut (rute laut dengan Samudra Arktik di sepanjang pantai utara Amerika Utara melalui Kepulauan Arktik Kanada) dan Rute Laut Utara di sepanjang pantai Arktik (Siberia) Rusia.

Dalam strategi nasional Arktik negara-negara anggota NATO, kepentingan ekonomi jelas mendominasi kepentingan politik dan pertimbangan militer. Contoh nyata untuk mengkonfirmasi pernyataan ini yaitu kepentingan Norwegia di kawasan Arktik tidak terbatas pada hidrokarbon saja. Perikanan adalah aset ekonomi negara yang besar. Masalah seputar produksi makanan laut telah berulang kali memicu konflik antara hubungan Rusia dan Norwegia. Norwegia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki markas militer permanen di luar Lingkaran Arktik. Norwegia sedang melobi bagian yang lebih besar pada Kutub Utara untuk dirinya sendiri dalam rencana Aliansi Atlantik Utara. Rencana Norwegia untuk memberikan peran terhadap NATO yang lebih besar di Kutub Utara didukung oleh Inggris. Sebagai anggota penting dari aliansi and *Nuclear Power*, Inggris sejak tahun 2010 memfokuskan diri pada isu-isu pertahanan dan keamanan di wilayah Arktik. Hal ini diungkapkan dalam mendukung ide Thorvald Stoltenberg untuk menciptakan mini-NATO Arktik. Pertemuan puncak Eropa Utara diadakan di London pada Januari 2011, dihadiri oleh perwakilan dari Inggris, Islandia, Swedia, Denmark, Finlandia, Norwegia, Estonia, Latvia dan Lithuania. Para ahli mengidentifikasi tujuan strategis dari organisasi regional baru sebagai mengekang pengaruh militer Rusia di Kutub Utara (Shaparov, 2014).

Masing-masing negara NATO di Kutub Utara telah melakukan investasi yang signifikan dalam kemampuan yang relevan, termasuk pengawasan, peringatan, dan rudal balistik pertahanan. Norwegia telah meningkatkan pengeluaran pertahanannya sebesar 25% secara sejak 2015. Norwegia memutuskan untuk mengakuisisi 52 pesawat tempur F-35 yang dilengkapi dengan Rudal Serangan Bersama dengan jangkauan hingga 550 km. Hal ini akan memberi Norwegia kemampuan untuk menyerang target dari jarak jauh. Latihan militer baru-baru ini menggambarkan meningkatnya peran High North untuk NATO. Trident Juncture pada 2018 mencakup semua anggota NATO serta Swedia dan Finlandia. Latihan itu adalah salah satu yang terbesar di NATO, yang melibatkan 50.000 peserta, 250 pesawat, 65 kapal dan banyak lagi dari 10.000 kendaraan. Amerika Serikat juga mengirimkan mobil pesawat rier USS Harry S. Truman ke latihan tersebut. Itu adalah pertama kalinya dalam hampir 30 tahun bahwa kapal induk Amerika Serikat telah memasuki Lingkaran Arktik, menyampaikan pesan politik yang kuat tentang peningkatan kesadaran NATO tentang pentingnya domain Atlantik Utara (Mikkola, 2019).

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian duatas yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, guna memudahkan penulis menganalisis masalah yang ada maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Asertifitas Rusia di kawasan Samudra Arktik dapat mengancam kepentingan NATO dan negara-negara di kawasan tersebut?
2. Bagaimana kebijakan negara-negara NATO yang berada di sekitar Arktik dalam mempertahankan kepentingannya di Samudra Arktik?
3. Bagaimana Respon NATO terhadap sikap asertifitas Rusia?

### Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada pembahasan bagaimana tindakan atau upaya NATO dalam merespon tindakan asertifitas Rusia di wilayah Samudra Arktik yang dimulai pada tahun 2008 hingga 2018 dan penulis tidak akan fokus pada tindakan China yang mulai masuk karena tertarik juga dengan wilayah Arktik karena memiliki banyak potensi di wilayah tersebut.

### Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belajang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah **Bagaimana upaya atau tindakan NATO membendung tindakan asertifitas Rusia di wilayah Samudra Arktik yang memicu perang militer dan ketegangan kontestasi geopolitik di wilayah Samudra Arktik?**

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sikap NATO terhadap tindakan Rusia
2. Untuk mengetahui asalan Rusia bersikap asertif di wilayah Arktik
3. Untuk mengatahui bagaimana sikap negara-negara yang berbatasan langsung di wilayah Arktik (Amerika Serikat, Denmark, Norwegia, Kanada)

### Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan dan memeperdalam pengetahuan peneliti secara teoritis dan praktis mengenai sikap ofensif Rusia dengan melakukan klaim di berbagai wilayah Arktik
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap permasalahan regional
3. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah Skripsi dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pasundan.